

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterlibatan warga dalam menggunakan hak dan ruang atau arena dimana warga dapat bertindak secara aktif dan kritis melalui *Voice* (suara) dengan tahapan yang dimulai dari: tahapan Penyelidikan, Perumusan Masalah, Identifikasi Daya Dukung, Rumusan Tujuan, Langkah Rincian, Merancang Anggaran, terkesan belum sampai pada titik maksimal karena beberapa faktor berikut;
 - 1) Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung.
 - 2) Pemberitahuan mengenai kegiatan penyusunan program kerja yang ada di desa selalu terlambat diberitahukan.
 - 3) Waktu kegiatan yang seringkali bertabrakan dengan waktu kerja masyarakat.
2. Keterlibatan warga dalam menggunakan hak dan ruang atau arena dimana warga dapat bertindak secara aktif dan kritis melalui *Akses* (kapasitas) dengan tahapan yang dimulai dari: tahapan Penyelidikan, Perumusan Masalah, Identifikasi Daya Dukung, Rumusan Tujuan, Langkah Rincian, Merancang

Anggaran, terkesan belum juga sampai pada titik kepuasan yang maksimal dari masyarakat karena beberapa faktor berikut;

1. Jumlah masyarakat yang hadir sedikit sekali, berbanding terbalik dengan jumlah undangan yang dibagi dari desa untuk mengajak atau mengundang masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pra-mus dan Musrengbang-Des.
2. Adanya ketidak sepehaman antara aparat desa dengan kelompok masyarakat tertentu yang mengakibatkan *out-put* dari musrengbang desa dirasakan hanya sebagian masyarakat tertentu saja.
3. Keterlibatan warga dalam menggunakan hak dan ruang atau arena di mana warga dapat bertindak secara aktif dan kritis melalui *Control* (pengawasan) dengan tahapan yang dimulai dari: tahapan Penyelidikan, Perumusan Masalah, Identifikasi Daya Dukung, Rumusan Tujuan, Langkah Rincian, Merancang Anggaran, terkesan belum juga sampai pada titik kepuasan yang maksimal dari masyarakat karena beberapa faktor berikut;

1. SDM masyarakat yang terbatas berimplikasi pada pemahaman masyarakat sendiri mengenai kegiatan bersama dari desa yang membangun dan ikut mengawasi pemberdayaan masyarakat, seperti kegiatan Pra-mus dan Musrengbang-Des.

2. Tidak adanya kader-kader mudah yang mampu memberikan penyuluhan dan meggerakan masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi setiap program kegiatan yang dicanangkan oleh desa.
3. Masyarakat terkesan sebagai penonton, karena masyarakat seakan merasa diri mereka tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi setiap program kegiatan yang dicanangkan di desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Voice (Suara)

1. Di dalam mausyawah rencana pembangunan desa, sebisa mungkin masyarakat jangan diwakilkan oleh RT dan kepala Dusun saja, tetapi dilibatkan langsung semua kelompok masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan tersebut, agar masyarakat secara langsung dapat memberikan gagasan atau pendapat serta mengetahui program-program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan di Desa.
2. Partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan, sebaiknya masyarakat lebih meningkatkan lagi partisipasi mereka dalam bentuk kontribusi gagasan, pemberian dana dan tenaga yang dimana tujuannya agar kegiatan pembangunan

yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang dicanangkan dan diharapkan bersama.

3. Pemerintah desa harus bekerja untuk kepentingan masyarakat sehingga target dan ukuran keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam desa dapat terwujudnya kesejahteraan, peningkatan SDM, peningkatan pelayanan, peningkatan tingkat daya beli masyarakat serta pemberdayaan kelompok masyarakat.
4. Pemerintah desa supaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum program kegiatan dilaksanakan dan melakukan komunikasi, koordinasi yang baik sehingga apa yang diharapkan dalam tata kelola pemerintahan pembangunan yang transparansi, akuntabel dan respondif dapat diwujudkan dengan baik.

2. Akses

1. Dalam merumus dan merancang program kegiatan desa harus diutamakan pemberdayaan sumber daya manusia yakni membuat program kegiatan pendidikan/pelatihan aparatur desa, kelompok masyarakat sehingga dapat mengakses program kegiatan desa maupun ditingkat kabupaten.
2. Sebaiknya masyarakat berpartisipasi langsung dalam berbagai kegiatan di desa serta mendorong terciptanya situasi yang aman

dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan serta semangat gotong-royong di desa.

3. Control (*Pengawasan*)

1. Diharapkan hasil pembangunan infrastruktur yang telah dicapai di Desa Ngoranale harus dirawat dan dipelihara sebaik - baiknya. Dalam hal ini sangat dibutuhkan kesadaran dari berbagai komponen dalam masyarakat untuk merawat dan memelihara agar hasil pembangunan yang sudah ada dapat terus dimanfaatkan masyarakat sendiri.
2. Masyarakat harus diberi ruang gerak oleh pemerintah desa untuk mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri.
3. Semua bentuk pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kinerja kerja aparatur serta program pembangunan di desa yang dilakukan secara sepihak harus dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.
4. Pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa harus melakukan koordinasi, komunikasi dengan masyarakat langsung yang berkaitan dengan kurangnya partisipasi dalam segala program kegiatan serta penyelesaian beberapa konflik internal antara masyarakat desa ngoranale dengan perangkat,

sehingga kedepan tidak ada lagi miskomunikasi dan apa yang akan menjadi target atau pencapaian kinerja terkait dapat terealisasikan.

Daftar Pustaka

- Abe, Alexander, 2001, *Perencanaan daerah memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.
-2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Penerbit Pondok Edukasi, Solo.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Conyers, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dadang Juliantara. (2002). *Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama
- Eko, Sutoro dan Abdur Rozaki (eds). 2005. *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*. Yogyakarta : IRE Press
- Eko, Sutoro (eds). 2011. *Suara Warga Suara Pembangunan (Sebuah Studi RPJM-Desa Di Sumba Timur)*. ACCES Kupang – NTT.
- Hasibuan, Malayu, S.P, 1993, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, CV. Haju Masagung, Jakarta
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Lexi, Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mubiyarto, 1984, *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta.
- Mikkelsen, Britha, 2006, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Milles, MB & Hubberman, AM, (1992) *Analisis Data Kualitatif* , Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.
- Nawawi,Handari.(2005). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*.(cet.11).Yogyakarta:
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rekso Putranto, Soemadi, 1992, *Manajemen Proyek Pemberdayaan*, Lembaga Penerbitan FE-UI, Jaka.
- Riduwan, 2005, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung.
- Sayrani, Lorensius, dkk. 2013. *Panduan Perencanaan Dan Penganggaran Partisipatif Dan Penyusunan Peraturan Desa*.Kupang : Bengkel APPeK NTT.
- Siagian, Sondang P, 1994, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Fendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta:LP3ES.

Sumber Lain :

Tesis :

Fitriastuti, Nurwi Mayasri, 2005, *Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, (Studi Optimalisasi Fungsi DPRD)*, Tesis, Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang.

Soemarmo, 2005, *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik)*, Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, *manajemen Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta. Wijaya, Rina, 2001, *Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*, Tesis, Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.